

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari bahan hayati seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang ditujukan untuk menjadi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dikelompokkan ke dalam sembilan jenis, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lainnya (aneka bumbu dan bahan minuman) (Badan Pangan Nasional Indonesia, 2024). Dari sembilan kelompok pangan tersebut, pangan hewani merupakan salah satu pangan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Pangan hewani merupakan bahan pangan yang berasal dari hewan dan hasil olahannya, seperti ikan, daging, telur dan susu (Apriyadi dan Hutajulu, 2020). Ketersediaan dan pemenuhan pangan hewani akan tercermin pada pola

konsumsi pangan, yaitu jenis dan jumlah pangan, baik dalam bentuk asli maupun olahan yang dikonsumsi oleh seseorang atau penduduk dalam jangka waktu tertentu untuk hidup sehat dan produktif (Statistik Konsumsi Pangan, 2024) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, pola hidup, pengetahuan gizi, aksesibilitas pangan, serta faktor-faktor lain yang terkait (Argandi *et al.*, 2019).

Secara nasional, kondisi ketahanan pangan terus diupayakan meningkat melalui pembaruan metodologi pengukuran yang lebih komprehensif. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun 2025 mencapai skor 73 yang terdiri dari aspek ketersediaan pangan (61,47), keterjangkauan pangan (82,70), dan pemanfaatan pangan (74,99) yang hampir mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sebesar 73,2 dengan lima wilayah capaian tertinggi meliputi Kabupaten Badung di Bali, Kota Payakumbuh di Sumatera Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan, dan Kota Solok di Sumatera Barat, sementara prioritas pembangunan pangan ke depan tetap diarahkan untuk memperkuat wilayah Indonesia bagian timur yang masih tertinggal (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2025).

Secara komposisi, sumber protein hewani nasional seperti ikan, daging, telur dan susu masing-masing menunjukkan 15,2%, 7,91%, dan 5,14% dari total konsumsi protein penduduk, sementara sumbangan terbesar masih berasal dari padi-padian sebesar 31,27%, sedangkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) protein yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia adalah 57 gram per kapita per hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Pada tingkat provinsi, ketersediaan protein hewani di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 36,72 gram per kapita per hari dari total ketersediaan protein sebesar 92,03 gram per kapita per hari (Badan Pangan Nasional, 2024). Meskipun total ketersediaan protein Sumatera Barat relatif mendekati AKG yang dianjurkan, kontribusi protein hewani di dalamnya masih tergolong rendah dan memerlukan perhatian lebih untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Kesenjangan ini semakin nyata terutama pada wilayah yang tertinggal, terisolir, dan terluar (3T) dalam provinsi tersebut.

Wilayah kepulauan dan terpencil umumnya menghadapi permasalahan ketahanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya karena keterbatasan dalam hal ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga pangan (Baidenggan *et al.*, 2025). Kondisi tersebut tercermin dari capaian IKP Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pada tahun 2024 masih berada pada kategori rentan dengan nilai IKP 53,86, disertai dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 9,31%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,27% (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025; RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai (2025), persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 13,89 persen. Selain itu, garis kemiskinan pada tahun 2024 mencapai Rp 461.088 per kapita per bulan, meningkat dari Rp 421.113 per kapita per bulan pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah kepulauan yang menghadapi kondisi tersebut, dengan luas wilayah mencapai 6.033,76 km² yang memiliki 4 (Empat) pulau utama yaitu ; Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah dari daratan Pulau Sumatera yang hanya dapat diakses melalui jalur laut dan udara, sehingga memiliki keterbatasan aksesibilitas pangan. Keterbatasan struktural ini yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya pada wilayah yang menjadi pusat aktivitas masyarakatnya.

Pulau Sipora menempati posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai yang secara administratif terbagi atas Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan (Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025). Posisi ini menjadikan Pulau Sipora sebagai lokasi yang tepat untuk mengamati lebih dalam bagaimana pola konsumsi pangan hewani rumah tangga terbentuk di tengah keterbatasan akses dan rendahnya capaian ketahanan pangan yang menjadi karakteristik umum wilayah kabupaten ini. Terpusatnya roda perekonomian di Pulau Sipora memungkinkan munculnya pola konsumsi yang berbeda dibandingkan wilayah lain yang letaknya lebih terpencil, meskipun keduanya tetap terikat pada keterbatasan struktural yang sama.

Di sisi lain, masyarakat Mentawai memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Kehidupan masyarakat Mentawai sendiri sangat bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan serta perikanan, sehingga pemenuhan pangan hewani rumah tangga memanfaatkan sumber daya

alam sekitar dengan cara berburu binatang, menangkap ikan, dan mengumpulkan bahan tanaman yang tersedia di lingkungan sekitar (Febrianto *et al.*, 2012).

Berbagai penelitian mengenai konsumsi pangan hewani telah dilakukan pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan di Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga pada wilayah kepulauan terluar seperti Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, masih sangat terbatas. Padahal karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas pangan, kondisi sosial budaya, serta komposisi etnis masyarakat diduga membentuk pola konsumsi pangan asal hewani yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Oleh karena itu, kajian mengenai pola konsumsi pangan asal hewani pada rumah tangga di Pulau Sipora menjadi penting untuk menghasilkan informasi empiris yang dapat mendukung perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pengembangan sektor peternakan di wilayah kepulauan.

Setiap komoditas pangan hewani seperti ikan, daging, telur, dan susu menunjukkan variasi dalam jumlah dan frekuensi konsumsi dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, struktur demografi, dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Konsumsi Pangan Asal Hewani Rumah Tangga di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai ?
2. Apakah ada pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai?

1.3 Tujuan Penelitian

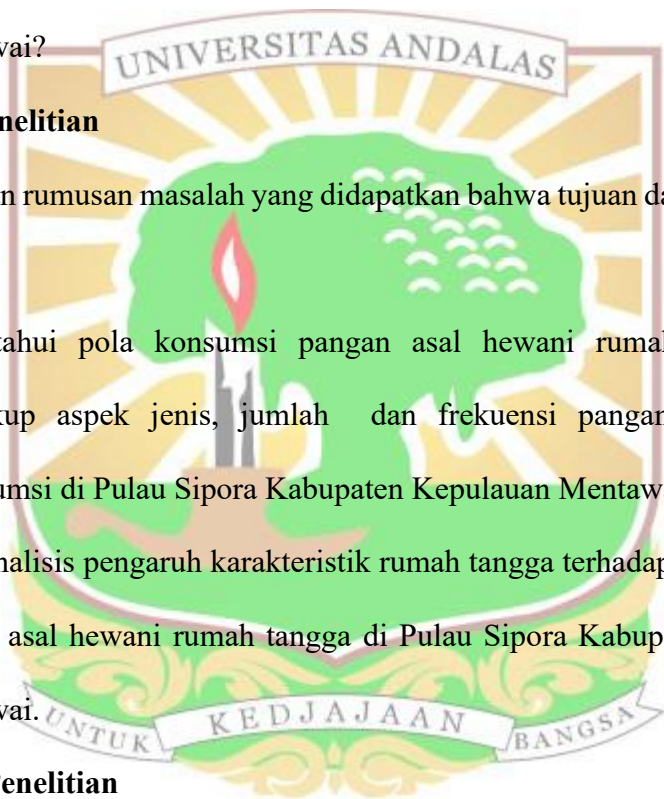
Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga yang mencakup aspek jenis, jumlah dan frekuensi pangan hewani yang dikonsumsi di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menganalisis pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai sektor dan memberikan dampak positif kepada pihak terhadap pengembangan ternak di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai :

1. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan asal hewani bisa memprediksi kebutuhan masyarakat terhadap hasil ternak, sehingga dapat mendukung perencanaan produksi peternakan yang lebih efisien



2. Bagi peternak, informasi ini dapat di pergunakan untuk dasar dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan di masa depan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Karakteristik rumah tangga diduga berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan asal hewani rumah tangga di Pulau Sipora.

